

MOBILITAS DAN POLITIKAL EKOLOGI GENTRIFIKASI DI IBUKOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

Nurul Aini¹

¹Universitas Gadjah Mada
aininurul@ugm.ac.id

ABSTRAK

Perubahan drastis sebuah kota atau wilayah, secara signifikan akan mengubah tatanan sosial didalamnya. Perpindahan ibukota negara, ke sebuah wilayah yang baru, tidak hanya berarti memindahkan ruang politik, tetapi juga memiliki ragam konsekuensi sosiologis. Salah satu bentuk konsekuensi sosiologis yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mobilitas dan gentrifikasi. Mobilitas akan terjadi sebagai efek dari migrasi pemerintahan dan aparatus pemerintahan yang akan bekerja di ibukota yang baru. Gentrifikasi akan terjadi ketika ruang urban baru tercipta melalui pembentukan wilayah ibukota baru, mendorong tumbuhnya mobilisasi kelas menengah yang mungkin akan menggusur ruang hidup penduduk asli setempat, terutama mereka dengan kelas sosial yang lebih rendah. Tulisan ini bertujuan melakukan elaborasi pustaka awal tentang sejauh mana gentrifikasi akan menimbulkan dampak sosial di ibu kota negara (IKN). Perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dibangun menjadi salah satu hal berpeluang besar untuk menggusur wilayah pemukiman penduduk lokal di sekitar IKN secara ekonomi dan secara sosial. Mengatasi persoalan gentrifikasi penting dalam upaya melihat problem pemindahan ibu kota tidak hanya dalam perspektif transisi politik, tetapi juga transisi sosial, ekonomi, dan spasial.

Kata kunci: *Mobilitas; Gentrifikasi; Ibu Kota Negara; Migrasi; Transisi ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara (IKN) Republik Indonesia, dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur secara positif bisa dimaknai sebagai upaya desentralisasi pemerintahan dari pulau Jawa ke luar Jawa. Selain itu, pemindahan ibukota juga mendorong pemerataan mobilitas penduduk karena selama ini jumlah penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yakni sebesar 56,1 persen (BPS, 2018). Jakarta sebagai ibukota negara saat ini, juga mengalami problem lingkungan dan sosial yang pelik, mulai dari kemacetan, banjir tahunan, problem air bersih, hingga penurunan tanah (*land subsidence*) yang diprediksi akan menghilangkan wilayah Jakarta dimasa yang akan datang.

Namun, disisi lain, pemindahan IKN juga mengundang kontroversi. Diantaranya, pemindahan IKN dianggap akan memindahkan kerusakan lingkungan di pulau yang telah menghadapi problem deforestasi tertinggi di dunia. Data dari Global Forest Watch menyebutkan antara tahun 2002 hingga 2002, area hutan primer berkurang 34 persen (Globalforestwatch.org). Dengan perpindahan ibukota baru, diperkirakan terjadi mobilitas dan

migrasi ASN dari Jakarta ke Nusantara—nama ibukota baru, sebanyak 4.8 juta (Normile, 2022).

Meskipun desain IKN Nusantara secara ideal berjargon *Future Smart Forest City of Indonesia*, dengan cita-cita seminimal mungkin melakukan intervensi terhadap alam dan keanekaragaman hayati didalamnya, dengan 5 prinsip utama, yaitu (1) *smart workplace*, yakni kompleks yang terkonsolidasi dan terkoneksi, (2) *smart living*, kota yang layak huni, inklusif dan berbasis komunitas (3) *smart mobility and transportation*, dengan orientasi 80% mobilitas warga ditopang oleh transportasi publik (4) *smart nature preservation*, yakni kota baru yang tetap menjaga ekosistem alam dan (5) *smart transformation of nation and culture*, sebagai tempat untuk merawat proses kebangsaan dan keberagaman (Kompas.com, 2 Februari 2022).

Desain kota pintar dan ekologis yang menjadi basis pembangunan IKN Nusantara, selain dihadapkan pada problem ekologis, juga dihadapkan pada problem sosial. Peminggiran masyarakat setempat, sebagai dampak dari pembangunan kota, permukiman dan komunitas baru atau dikenal dengan gentrifikasi. Gentrifikasi yang dimulai dari studi oleh Glass (1964) mengenai pertumbuhan masyarakat kelas menengah baru pasca pasca-industrial di London tahun 1960an yang membeli unit perumahan di pinggiran kota milik kelas pekerja yang kemudian meningkatkan harga jual tanah disekitarnya. Hal ini membuat kelas miskin menjual tanah mereka, dan membuat mereka harus menyingkir ke pinggiran kota yang lebih jauh dengan harga jual tanah yang lebih murah.

Kedatangan ASN yang notabene adalah kelas menengah akan mendorong perubahan lanskap sosial dan transformasi ekonomi di IKN, disamping problem ekologis terkait deforestasi di pulau Kalimantan. Tulisan ini hendak menggabungkan dua problem utama yang hadir pasca dipindahkannya IKN, yakni problem ekologi dan gentrifikasi. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah sejauh mana problem ekologi dan gentrifikasi muncul pasca terbentuknya IKN dan bagaimana alternatif penyelesaian masalah kedepan?

Gentrifikasi adalah sebuah konsep yang melihat peminggiran komunitas yang lebih miskin dalam ruang kota sebagai dampak dari pembangunan ulang kota. Tidak hanya bermakna peminggiran ruang fisik atau tempat tinggal, tetapi nilai tanah yang semakin tinggi sebagai akibat tingginya permintaan dari kelas menengah semakin menjauhkan waga miskin dari akses terhadap tanah dan tempat tinggal. Studi gentrifikasi tidak hanya merupakan studi tentang peminggiran, tetapi juga hilangnya nilai tanah, lingkungan, akses terhadap mobilitas dan juga pelayanan publik, karena warga miskin semakin tersingkir menjauh dari pusat dan pinggiran kota (Morales, 2015). Sementara itu, studi politikal ekologi adalah sebuah studi kritis yang meletakkan *nexus* manusia dan lingkungan dalam relasi sosio politik kekuasaan. Politikal ekologi menghubungkan disiplin antropologi, geografi, dan disiplin lain seperti sosiologi, terutama ketika melihat pola hubungan antara ekologi, kekuasaan, dan ekonomi kapitalisme (Roberts, 2020).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teoretik politik ekologi gentrifikasi. Pendekatan ini mengkombinasikan antara pendekatan gentrifikasi dan politik ekologi, yakni politikal ekologi gentrifikasi. Politikal ekonomi gentrifikasi mengakui hubungan antara lingkungan, dan politik lingkungan, semuanya mempengaruhi proses gentrifikasi (Quastel, 2009)

2. METODE

Sebagai studi awal, tulisan ini akan didasarkan pada kajian pustaka, terutama terkait studi gentrifikasi dalam konteks ekologis tertentu. Dengan melakukan studi komparasi berbagai kasus gentrifikasi di wilayah kota baru, studi ini diharapkan bisa berkontribusi dalam upaya mencegah problem sosial ekologis yang mungkin timbul pasca dibangunnya IKN. Kajian ini

juga berkontribusi terhadap pengembangan teoretik political ekologi gentrifikasi. Pada studi lanjutan, penggunaan metode penelitian yang lebih bersifat grounded dan empiric dimungkinkan, misalnya studi etnografi.

3. KESIMPULAN

Mengenali potensi gentrifikasi di Ibu kota baru Nusantara diperlukan sebagai upaya untuk membangun kota yang lebih sensitif terhadap problem kelas dan ketimpangan yang akan muncul dikemudian hari. Pendekatan politikal ekologi gentrifikasi juga diperlukan, mengingat Kalimantan adalah salah satu pusat oksigen dunia karena posisinya ekologisnya sebagai hutan hujan tropis terbesar di dunia. Peminggiran komunitas sosial tertentu, bisa juga bermakna peningkatan resiko ekologis dan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat. Studi ini diharapkan bisa memberi masukan terhadap pengelolaan ibukota baru dari perspektif politikal ekologi gentrifikasi.

REKOGNISI

-

REFERENSI

- Andrew Harris. 2008. *From London to Mumbai and Back Again: Gentrification and Public Policy in Comparative Perspective Urban Studies* (NOVEMBER 2008, Vol. 45, No. 12, Special Issue: Gentrification and Public Policy (NOVEMBER 2008), pp. 2407-2428).
- Ernesto López-Morales. 2015. *Gentrification in The Global South, City*. (19:4, 564-573, DOI: 10.1080/13604813.2015.1051746).
- Global Forest Watch. Diakses di <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN>
- Kompas.com. 2022. *Mengenal 5 Prinsip dalam Konsep Desain IKN Nusantara*. Kompas.com 21 Februari. Diakses di <https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/21/163000821/mengenal-5-prinsip-dalam-konsep-desain-ikn-nusantara?page=all>.
- Normile, Dennis. 2022. *Indonesia's utopian new capital may not be as green as it looks*. (Science.org, 3 Februari 2022). Diakses di <https://www.science.org/content/article/indonesia-s-utopian-new-capital-may-not-be-green-it-looks>.
- Noah Quastel. 2009. *Political Ecologies of Gentrification*. (Urban Geography, 30:7, 694-725, DOI: 10.2747/0272-3638.30.7.694).
- Roberts, Jason. 2020. *Political Ecology*. (the Cambridge Encyclopedia of Antropology. DOI: <http://doi.org/10.29164/20polieco>). Diakses di <https://www.anthroencyclopedia.com/entry/political-ecology>.